



Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah)

Budget Preparation Participation Impact on the Commitment and Culture of Organization and Decentralization as Variables of Moderation (A Case Study on the Office of Industry and Commerce of Central Java Province)

Eka Budi Setyaningtyas, Andwiani Sinarasri
Universitas Muhammadiyah Semarang, Kota Semarang
ekatyas98@yahoo.co.id, andwiani@unimus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi sebagai variabel moderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai struktural Dinperindag yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 35 responden yang merupakan pejabat struktural di Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dibuktikan dengan nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$). Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan budaya organisasi dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja aparat pemerintah daerah, partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, budaya organisasi, desentralisasi

Abstract

The aims of this research is to examine the impact of participation in budgeting on the performance of the local government apparatus with commitment of organization, organization culture and decentralization as moderating variables of Dinperindag of Jawa Tengah. The sample used in this research is structural staff of the Ministry of Industry and Trade involved in the budget preparation process. The sampling method used was purposive sampling. The number of samples used was 35 respondents which is in the Provincial Office of Central Java. The data analysis technique used is simple and multiple regression analysis. The results of this study indicate that budgetary participation has effect on the performance of local government officials as evidenced by the value greater significance value ($0,001 < 0,05$). Organizational commitment has effect on the relationship of budgetary participation and performance of local government officials, while organizational culture and decentralization have no effect on the relationship between participation in budgeting and the performance of local government officials.

Keywords: Performance of Local Government Officials, Participation in Budget Preparation, Organizational Commitment, Organizational Culture, Decentralization.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menyebabkan suatu organisasi publik harus melaporkan kinerjanya. Hal tersebut dinyatakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP). LHE AKIP regional



tiga yang meliputi wilayah Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat tahun 2017 telah dievaluasi oleh PAN-RB menjelaskan bahwa sebanyak 131 pemerintah kabupaten/kota masih mendapat kategori “CC” , “C”, dan “D”. Hal tersebut mencerminkan dari 186 pemerintah kabupaten/kota dalam regional tiga, masih terdapat 131 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dominan masih rendah.

Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Penganggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah dapat diperkuat dengan variabel lain. Variabel yang memperkuat hubungan tersebut adalah variabel moderasi. Beberapa variabel yang diduga dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah antara lain, motivasi, *Job Relevant Information (JRI)*, desentralisasi, komitmen organisasi dan budaya organisasi (Nazaruddin dan Setyawan, 2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah; dan untuk memperoleh bukti empiris apakah komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kinerja suatu organisasi/instansi adalah motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lingkungan organisasi/instansi tersebut. Keterlibatan bawahan di sebuah instansi dalam menyusun anggaran akan memungkinkan untuk memberikan informasi yang optimal. Informasi yang berasal dari bawahan tentunya juga memperhatikan struktur organisasi yang ada. Informasi untuk pengambilan keputusan memerlukan wewenang/desentralisasi bagi pihak yang membutuhkan. Desentralisasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para atasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka dengan mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan khas untuk menangani kondisi-kondisi yang tidak menentu (Lestari, 2014:7). Adanya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi para manajer atau bawahan diberikan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik akan diikuti dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan kerja keras untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Adanya komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

Selain komitmen organisasi, budaya organisasi juga merupakan variabel moderasi yang akan mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma- norma yang unik dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi pada sisi internal aparatur akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan keuntungan pada aparatur itu sendiri karena akan memberikan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat ini akan dapat meningkatkan harapan aparat agar kinerjanya meningkat (Agusti, 2012).

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai



individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan (Sardjito dan Muthaher, 2007). Dari pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut.

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komitmen organisasi yang tinggi dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Dari pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:

H2 : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

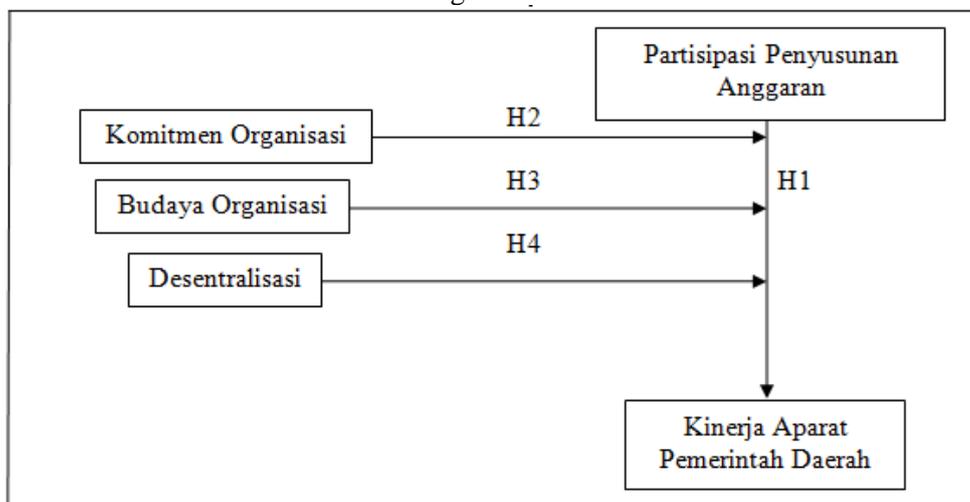
Luthans dalam Helmi (2005) dalam Agusti (2012) menekankan budaya organisasi dalam perspektif yang berbeda, dimana budaya organisasi merupakan individu – individu yang saling berhubungan dalam organisasi, mereka saling berhubungan dengan saling melengkapi norma – norma, peraturan formal organisasi, prilaku, tugas, sistem, kelompok yang hanya dimengerti oleh anggota. Elemen – elemen budaya organisasi yang bagus akan meningkatkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang ketiga yaitu:

H3 : Budaya organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Miah dan Mia (1996) dalam Lestari (2014) menyatakan bahwa desentralisasi pengambilan keputusan yang memiliki implikasi pada kinerja yang jangkauannya luas bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Desentralisasi pengambilan keputusan dilakukan oleh para atasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan mendorong mereka mengembangkan kemampuan khas dalam menangani kondisi – kondisi yang tidak menentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu:

H4 : Desentralisasi memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Gambar 1:
Kerangka Pemikiran





METODE PENELITIAN

Variabel penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran (X_1), komitmen organisasi (X_2), budaya organisasi (X_3), desentralisasi (X_4), dan kinerja aparat pemerintah daerah (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran. Kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel dependen, serta komitmen organisasi, budaya organisasi, dan desentralisasi sebagai variabel moderasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Pihak-pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bag, Kepala Balai, dan Kepala UPT. Jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 35. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, pengujian kualitas data, kedua melakukan pengujian asumsi klasik. Tahap ketiga, analisis regresi sederhana dan berganda. Tahap keempat yaitu melakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1:
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPA	35	15	25	19.74	2.241
KO	35	21	41	31.06	4.101
BO	35	51	74	65.86	5.018
D	35	17	37	28.66	5.780
K	35	28	45	35.94	4.385
Valid N (listwise)	35				

Tabel 1 menyajikan bahwa dengan jumlah responden 35 orang, variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 15. Nilai rata-rata partisipasi penyusunan anggaran yaitu 19,74, jika dibandingkan dengan nilai kisaran teoritis 5 sampai 25, artinya tingkat partisipasi penyusunan anggaran pegawai relatif tinggi. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai maksimum 41, nilai minimum 21, rata-rata 31,06. Nilai rata-rata komitmen organisasi yaitu 31,06, jika dibandingkan dengan nilai kisaran teoritis 9 sampai 45, artinya tingkat komitmen organisasi pegawai relatif tinggi. Variabel budaya organisasi memiliki nilai maksimum 74, nilai minimum 51, rata-rata 65,86. Nilai rata-rata budaya organisasi yaitu 65,86, jika dibandingkan dengan nilai kisaran teoritis 15 sampai 75, artinya tingkat budaya organisasi pegawai relatif tinggi. Variabel desentralisasi memiliki nilai maksimum 37, nilai minimum 17, rata-rata 28,66. Nilai rata-rata desentralisasi yaitu 28,66, jika dibandingkan dengan nilai kisaran teoritis 8 sampai 40, artinya tingkat desentralisasi pegawai cukup. Variabel kinerja aparat pemerintah daerah memiliki nilai maksimum 45, nilai minimum 28, rata-rata 35,94. Nilai rata-rata kinerja aparat pemerintah daerah yaitu 35,94, jika dibandingkan dengan nilai kisaran 9 sampai 45, artinya kinerja aparat pemerintah daerah relatif tinggi.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hasil uji validitas menunjukkan nilai signifikansi untuk semua item pertanyaan adalah kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah valid. Selanjutnya, untuk hasil uji



reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel diatas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2:
Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Alat Analisis Uji Asumsi Klasik	Pendekatan Olah Data	Keterangan
1.	Uji Normalitas	Kolmogorov Sminov	Memenuhi
2.	Uji Autokorelasi	Durbin Watson	Bebas
3.	Uji Multikolinearitas	VIF dan Tolerance	Bebas
4.	Uji Heteroskedastisitas	Glejsers	Bebas

Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 (H_1) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk menguji hipotesis 1 digunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil rangkuman analisis regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3:
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
1 (Constant)	15.529	2.702	.011
PPA	1.034	3.574	.001
KO	-5.696	-2.839	.008
BO	1.679	.659	.515
D	-1.229	-.821	.418
PPA*KO	.297	2.945	.006
PPA*BO	-.084	-.652	.519
PPA*D	.065	.841	.407

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Indikasi dari hasil penelitian ini yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah pada Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Adanya partisipasi penyusunan anggaran yang baik tersebut dapat mendorong pegawai untuk bertanggungjawab mencapai tujuan dari masing-masing tugasnya, sehingga kinerjanya akan meningkat.

Uji Hipotesis 2

Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dibawah 0,05 yaitu 0,006, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Indikasi dari hasil penelitian ini yaitu komitmen organisasi dapat memoderasi atau memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah pada Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Faktor komitmen organisasi merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya komitmen organisasi dalam diri individu akan membuat individu tersebut berusaha terus mencapai tujuan organisasi dan kemauan mengerahkan usaha yang akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.



Uji Hipotesis 3

H3 (H_3) menyatakan bahwa budaya organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,519. Berdasarkan hal tersebut maka H3 ditolak yang menyatakan bahwa budaya organisasi (VM_2) memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Nazaruddin dan Setyawan (2012) serta Sakti (2017). Indikasi dari hasil penelitian ini yaitu budaya organisasi tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran kinerja dengan kinerja aparat pemerintah daerah pada Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Faktor budaya organisasi juga berpengaruh terhadap perilaku dan cara kerja untuk mencapai kinerja yang baik, akan tetapi budaya organisasi juga ditentukan oleh peraturan yang mengikat birokrasi atau organisasi publik tersebut, sehingga dalam penelitian ini budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang berada di Dinperindag provinsi Jawa Tengah.

Uji Hipotesis 4

H4 (H_4) menyatakan bahwa desentralisasi memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai signifikansi untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diatas 0,05 yaitu 0,407. Berdasarkan hal tersebut maka H4 ditolak yang menyatakan bahwa desentralisasi (VM_3) memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Arifin dan Rohman (2012). Indikasi dari hasil penelitian ini yaitu desentralisasi tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran kinerja dengan kinerja aparat pemerintah daerah pada Dinperindag provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi di Dinperindag tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tinggi dalam penyusunan anggaran, karena walaupun pegawai mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan tetapi hasil akhir dari keputusan ada di pegawai yang jabatannya lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan hipotesis yang telah disusun serta analisis dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Kedua, komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Ketiga, budaya organisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Keempat, desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian untuk variabel kinerja aparat pemerintah daerah jika diukur dengan kuesioner akan menghasilkan data yang subjektif, sedangkan jika diukur dengan data sekunder tidak bisa mencerminkan kinerja dari aparat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Restu. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal Ekonomi. Volume 20, No. 3. September 2012.



- Arifin, Sholikhun dan Rohman, Abdur. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 1, No 2. 2012.
- Lestari,Riza. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dengan Gaya Kepemimpinan, Desentralisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. JOM FEKON. Volume 1 No. 1 Oktober 2014.
- Nazaruddin, Ietje dan Setyawan, Henry. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Volume 12. No 2. Juli 2012.
- Sakti, Krisna Murti Darpita. 2017. *Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajrial dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagi Variabel Pmoderasi*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarjito, Bambang dan Osmed Munthaher. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi*”